

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalitas kerja pada bidang yang memiliki risiko tinggi serta potensi akibat yang serius apabila terjadi kesalahan atau kecelakaan, instansi pemadam kebakaran sebagai abdi masyarakat dituntut untuk selalu siap siaga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, instansi pemadam kebakaran harus memiliki sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal serta profesional.¹ Sebagai bentuk perhatian terhadap para pegawai, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebagai landasan hukum yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Menurut Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa: “1) Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a) keselamatan dan kesehatan kerja, b) moral dan kesusilaan, dan c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama; 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan

¹ Ella Fahriza, 2025, Perlindungan Hukum bagi Petugas Pemadam Kebakaran yang Mengalami Insiden Kecelakaan Kerja (Studi Satuan Polisi Pamong Praja), *Jurnal Ilmiah Waha Pendidikan*, 11(8) 2025, hal. 70.

kesehatan kerja. Selain itu dijelaskan pula dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, yaitu setiap perusahaan/instansi wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan/Instansi.²

Ruang lingkup dari keselamatan kerja, yaitu suatu program yang dibuat bagi para pekerja atau pegawai sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.³ Keselamatan kerja sendiri bertalian dengan adanya kecelakaan kerja, kecelakaan kerja yang dimaksud yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja ataupun yang secara umum dapat diartikan suatu kejadian yang tidak terduga atau tidak diinginkan di tempat kerja pada saat melakukan pekerjaannya.⁴

Selain jaminan sosial, implementasi *Standard Operational Procedure* (SOP) yang jelas dan konsisten menjadi bagian integral dalam penerapan K3 di instansi pemadam kebakaran. SOP berfungsi sebagai pedoman operasional yang menjelaskan langkah-langkah kerja yang aman, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), serta mekanisme tanggap darurat agar setiap petugas memahami dan menerapkan prosedur yang tepat dalam situasi berbahaya.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

³ H. Tannady, 2020, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Jakarta, hal. 83.

⁴ R. Lolowang, 2020, *Manajemen Keselamatan dan Penggunaan APD*, Alfabeta, Bandung, hal. 2.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan SOP dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) berkorelasi signifikan dengan penurunan kecelakaan kerja serta peningkatan kepatuhan kerja di lingkungan pemadam kebakaran.⁵

Berdasarkan data observasi yang telah peneliti himpun, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro telah menangani sebanyak 243 kasus kebakaran dan 2.040 kasus non kebakaran selama tahun 2025. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa beban kerja yang diemban sangat tinggi, tidak hanya dalam penanganan peristiwa kebakaran, tetapi juga dalam berbagai kejadian darurat lainnya seperti evakuasi, penyelamatan, dan penanganan situasi berisiko. Tingginya intensitas penanganan kasus tersebut menegaskan bahwa pekerjaan pada dinas pemadam kebakaran tergolong berat, kompleks, dan memiliki tingkat risiko yang tinggi.⁶

Dengan karakteristik tugas yang demikian, penerapan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang ketat menjadi suatu keharusan. SOP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan bagi petugas dalam menjalankan tugas di lapangan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala. Beberapa peralatan maupun unit kendaraan operasional yang akan digunakan kerap mengalami hambatan, baik yang bersifat teknis seperti kerusakan mesin dan

⁵ Aminatus Sholikhah, 2023, Hubungan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3) dengan Kecelakaan Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(12) 2023, hal. 30.

⁶ Data observasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, 2025.

keterbatasan suku cadang, maupun non teknis seperti keterbatasan anggaran pemeliharaan atau administrasi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat respons cepat serta kinerja pegawai dalam menangani keadaan darurat.

Dalam hal ini, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan, khususnya dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, penguatan anggaran operasional, serta evaluasi rutin terhadap implementasi SOP. Dengan dukungan peralatan yang memadai dan prosedur kerja yang dijalankan secara konsisten, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dapat meningkatkan kinerja, keselamatan petugas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Oleh karena itu, berangkat dari fenomena tersebut peneliti bermaksud mengangkat permasalahan tersebut ke dalam bentuk penelitian ilmiah yang diberi judul “Tinjauan Implementasi *Standart Operational Procedure* (SOP) dalam Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah implementasi *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro?

2. Apakah implementasi *Standard Operational Procedure* (SOP) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi *Standard Operational Procedure* (SOP) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dengan PP Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum administrasi negara, hukum ketenagakerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3), melalui kajian mengenai implementasi *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012

tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang membahas penerapan SOP, SMK3, dan perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran maupun instansi pemerintah yang memiliki tingkat risiko kerja tinggi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah akan pentingnya implementasi *Standart Operational Procedure* (SOP) bagi petugas di bidang beresiko tinggi demi keselamatan dan kesehatan mereka sendiri selama mengemban tugas berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

b. Bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pentingnya penerapan SOP di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan agar terwujudnya suatu pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan profesional.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai implementasi SOP terkait dengan suatu pelayanan publik berupa penanganan pemadaman kebakaran dan

penyelamatan korban, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya keamanan dan kesehatan petugas selama menjalankan tugas lapangan berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.⁷ Penelitian hukum empiris atau *socio-legal* (*socio legal research*) yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*).⁸

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-

⁷ Jonaedi Effendi & Johny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana Media Group, Jakarta, hal. 14.

⁸ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Jakarta, hal. 132.

undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.⁹ Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.¹⁰

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yang diperoleh melalui penelaahan langsung terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer tersebut meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta peraturan lain yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta penerapan *Standard Operational Procedure* (SOP). Fokus utama penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai konsep, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah sebagai dasar untuk

⁹ Wiwik Sri Widiarty, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hal. 132.

¹⁰ Mushafi, 2025, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hal. 35.

menganalisis implementasi SOP berdasarkan prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

b. Data sekunder

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 4) Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/Men/1980 Tentang Standar Teknis Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
- 5) Permendagri No.114 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

4. Proses Data

Dalam penelitian ini, dalam pengumpulan data menggunakan beberapa metode, diantaranya:

a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Dalam hal ini, peneliti memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini.

b. Metode lapangan (*field research*)

Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya:

1) Metode wawancara

Metode wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode ini peneliti gunakan dalam memperoleh data-data yang kurang dapat diperoleh dengan metode lainnya. Bentuk wawancara yang dipersiapkan dalam penelitian ini adalah berjenis wawancara semi terstruktur yang menurut wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.¹¹

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi lebih mendalam secara langsung dari pihak yang dinilai berkompeten dalam memberikan penjelasan mengenai *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di

¹¹ Sugiyono, 2021, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hal. 223.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

2) Metode observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹² Observasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan observasi partisipatif. Observasi partisipatif menurut Sugiyono, peneliti melakukan pengamatan juga melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, maka diharapkan data yang diperoleh lebih lengkap, tajam, dan mengetahui tingkat makna setiap perilaku yang tampak. Observasi atau pengamatan dilakukan peneliti di lapangan untuk mengetahui fakta-fakta yang berkaitan dengan implementasi *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

3) Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹³ Jadi, metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data berdasarkan dokumen tentang hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas.

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data berupa foto

¹² Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Yogyakarta, hal. 167.

¹³ Widiarty, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hal. 57.

yang relevan di lapangan. Foto-foto yang dimaksud berkaitan dengan implementasi *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana. Karena metode ini memiliki tahapan-tahapan yang digunakan cukup banyak sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian. Miles, Huberman, dan Saldana mengemukakan model interaktif dalam analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Pada langkah ini data yang diperoleh dicatat dalam uraian yang terperinci. Dari data-data yang sudah dicatat tersebut, kemudian dilakukan penyederhanaan data. Data-data yang dipilih hanya data yang berkaitan dengan masalah yang akan dianalisis, dalam hal ini tentang implementasi *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro. Informasi yang mengacu pada permasalahan itulah yang menjadi data dalam penelitian ini.

b. Penyajian Data

Pada langkah ini, data-data yang sudah ditetapkan kemudian disusun secara teratur dan terperinci agar mudah dipahami. Data-data

tersebut kemudian dianalisis sehingga diperoleh deskripsi tentang implementasi *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini dibuat kesimpulan tentang hasil dari data yang diperoleh sejak awal penelitian. Kesimpulan ini masih memerlukan adanya verifikasi (penelitian kembali tentang kebenaran laporan) sehingga hasil yang diperoleh benar-benar valid.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini mengarah pada maksud yang sesuai dengan judul, maka peneliti menyusun penelitian ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang beberapa pokok bahasan yang terdapat pada judul yang dijabarkan secara teoritis yang mencakup Teori Tentang *Standart Operational Procedure* (SOP), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian yang dijabarkan lebih detail terkait data penelitian meliputi implementasi *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, serta kesesuaian implementasi *Standard Operational Procedure* (SOP) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dengan ketentuan PP Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari sebuah pembahasan yang ada. Isi bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti.